

Pola Komunikasi Dalam Ideologi Pancasila

Nailis Sa'adah¹, Azeedt Pahlawan², Khairunnisa Purwadewi³, Zulfan Arinata⁴, Irfa Ilmi⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Correspondence Email : nailis1209@gmail.com

ABSTRACT

The communication patterns within the ideology of Pancasila encompass communicative interactions between the government and the people, as well as among fellow citizens. This involves communication between state institutions, such as the executive, legislative, and judiciary branches, as well as communication between state institutions and society. This research aims to analyze communication patterns within the context of the Pancasila ideology, where Pancasila ideology, as the foundation of the Indonesian state, plays a crucial role in fostering harmony, justice, and unity among various entities in society. This research adopts a literature review approach, collecting data from various sources, including relevant books and journals. The research findings indicate that effective communication within the Pancasila ideology is based on principles of justice, equality, unity, mutual cooperation, and humanity. Effective communication between the government and the people, among fellow citizens, between state institutions and society, as well as among different religions and cultures, is essential in fostering harmony, strengthening public participation, and preserving unity amidst cultural diversity.

Keyword : Communication Patterns; Pancasila; Ideology

ABSTRAK

Pola komunikasi dalam ideologi Pancasila mencakup interaksi komunikatif antara pemerintah dan rakyat, serta antara sesama warga negara. Hal ini melibatkan komunikasi antarlembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi dalam konteks ideologi Pancasila yang mana Ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan penting dalam membangun kerukunan, keadilan, dan persatuan di antara berbagai entitas dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku dan jurnal yang relevan dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dalam ideologi Pancasila didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, persatuan, gotong royong, dan kemanusiaan. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan rakyat, antara sesama rakyat, antara lembaga negara dengan masyarakat, serta antara agama-agama dan antarbudaya, penting dalam membangun kerukunan, memperkuat partisipasi publik, dan menjaga persatuan dalam keragaman budaya.

Kata Kunci : Pola Komunikasi; ideology; pancasila

PENDAHULUAN

Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik suatu negara. Di Indonesia, negara yang berdasarkan pada ideologi Pancasila, pola komunikasi menjadi faktor krusial dalam memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di antara warga negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis pola komunikasi yang terjadi dalam konteks ideologi Pancasila.

Pola komunikasi dalam ideologi Pancasila mencakup interaksi komunikatif antara pemerintah dan rakyat, serta antara sesama warga negara. Hal ini melibatkan komunikasi antarlembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat. Selain itu, komunikasi antaragama dan antarbudaya juga menjadi aspek penting dalam pola komunikasi dalam ideologi Pancasila.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, tantangan dan hambatan dalam pola komunikasi ideologi Pancasila juga perlu diperhatikan. Pengaruh media massa dan teknologi digital dapat mempengaruhi cara komunikasi dan penyebaran nilai-nilai ideologi. Selain itu, konflik dan perselisihan ideologi juga bisa mempengaruhi pola komunikasi dalam mencapai kesepahaman dan keselarasan di antara masyarakat.

Dalam artikel ini, akan dianalisis pola komunikasi dalam ideologi Pancasila dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, tantangan yang dihadapi, serta implikasi pola komunikasi terhadap kehidupan

berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran komunikasi dalam memperkuat ideologi Pancasila serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan pola komunikasi yang lebih efektif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pola komunikasi yang terjadi dalam konteks ideologi Pancasila di Indonesia, Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi dalam ideologi Pancasila, Menjelaskan tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pola komunikasi ideologi Pancasila serta Menganalisis implikasi pola komunikasi dalam ideologi Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan Memberikan rekomendasi untuk pengembangan pola komunikasi yang lebih efektif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Adapun rumusan masalah Penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan penelitian berikut ini: 1) Bagaimana pola komunikasi yang terjadi dalam konteks ideologi Pancasila di Indonesia? 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi dalam ideologi Pancasila? 3) Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pola komunikasi ideologi Pancasila? 4) Apa implikasi pola komunikasi dalam ideologi Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? 5) Bagaimana rekomendasi pengembangan pola komunikasi yang lebih efektif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila?.

Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan

mengarahkan upaya untuk menganalisis dan memahami secara mendalam pola komunikasi dalam ideologi Pancasila, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pola komunikasi ideologi Pancasila, serta memberikan implikasi dan rekomendasi untuk pengembangan pola komunikasi yang lebih efektif dalam memperkuat ideologi Pancasila di tengah kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi informasi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi akademisi, praktisi, dan pihak-pihak terkait dalam memahami dan meningkatkan pola komunikasi dalam ideologi Pancasila, sehingga dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan berkeadilan sesuai dengan semangat Pancasila.

METODE PENELITIAN

Adapun metodologi penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Menurut Dr. Muthadi Abd Mun'im, pendekatan kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan yang tidak diukur dengan angka (Mun'im,; 2013).

Berkaitan dengan jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu menurut Abdul Rahman Sholeh, adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah yang berhubungan dengan judul dilandaskan pada 2 sumber yaitu:

Sumber Primer: Karya Buku "Cooperatif learning", karya Slavin, R.E 2015. Dan "Sistem pencernaan Manusia", karya Enik Kurniawati dkk"

2020. Sumber Sekunder: Karya-karya yang berhubungan dengan konteks penelitian baik dari literatur, jurnal, buku-buku, serta media internet yang berkaitan dengan tema yang menjadi fokus penelitian.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi studi pustaka (Mahmud; 2013). Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, dimana peneliti berusaha mendokumentasikan data melalui studi pustaka yang berkaitan dengan pandangan mufassir nusantara secara khusus terkait problematika yang dibahas dalam fokus penelitian, baik berupa temuan dari data primer maupun dari data sekunder, kemudian mengklasifikasi hasil temuan data disesuaikan dengan tema di masing-masing pembahasan.

Adapun langkah-langkah penjabaran metodis dalam penelitian ini adalah (zed, 2004):

- 1) Menentukan objek yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis mengkaji hasil belajar materi sistem pencernaan manusia.
- 2) Penulis menentukan objek formal yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengangkat isu tentang model (CIRC) terhadap hasil belajar materi sistem pencernaan manusia.
- 3) Mengumpulkan data-data terkait dengan penelitian ini. Baik itu data primer maupun data sekunder yang mendukung dalam kajian ini. Sekaligus menjadi acuan atau sumber dalam penelitian ini.
- 4) Melakukan identifikasi terkait elemen-elemen hasil pembelajaran yang berhubungan dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu hasil pembelajaran materi sistem pencernaan manusia.
- 5) Penulis melakukan penyimpulan secara komprehensif, sebagai jawaban dari konteks penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

1. Definisi dan Konsepsi Pancasila
Ideologi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti prinsip atau nilai. Oleh karena itu, Pancasila dapat diartikan sebagai "lima prinsip" atau "lima nilai dasar" yang menjadi landasan dalam membangun negara Indonesia (Djajaneegara dan Martowikrido; 2017)

Konsepsi Pancasila dipelopori oleh para pendiri bangsa Indonesia, termasuk Soekarno dan Hatta, yang berusaha menciptakan suatu identitas nasional yang kuat dan mempersatukan beragam suku, budaya, agama, dan kepentingan yang ada di Indonesia. Pancasila mencerminkan semangat kebhinekaan dan persatuan dalam kerangka negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Pancasila terdiri dari lima prinsip yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Kelima prinsip tersebut adalah (Hidayat, 2018):

1 Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber kekuatan, nilai, dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini menghormati kebebasan beragama dan mengajak warga negara untuk menjalankan

keyakinan agamanya masing-masing.

2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan hak asasi manusia, serta membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Prinsip ini juga mendorong penghapusan segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi.

3 Persatuan Indonesia

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mengatasi perbedaan dan konflik yang mungkin muncul, serta membangun kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui sistem demokrasi yang melibatkan permusyawaratan dan perwakilan. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip ini menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan keuntungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

6 Prinsip ini mengajak untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi guna mencapai kesejahteraan bersama.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan

rumusan nilai-nilai yang mencerminkan identitas nasional, persatuan, dan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi landasan dalam pembangunan negara, pembentukan kebijakan publik, dan pengaturan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

2 Relevansi Ideologi Pancasila dalam Konteks Komunikasi

Ideologi Pancasila memiliki relevansi yang kuat dalam konteks komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan sosial dan politik sebuah negara. Dalam hal ini, ideologi Pancasila memberikan arahan dan landasan bagi pola komunikasi yang memperkuat persatuan, mempromosikan nilai-nilai keadilan, dan menjaga harmoni antarwarga Negara (Kristiawan dan Hasyim ; 2019) Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan relevansi ideologi Pancasila dalam konteks komunikasi:

1. **Pemersatu dalam Kebhinekaan**
Ideologi Pancasila mengakui dan menghargai kebhinekaan bangsa Indonesia. Dalam konteks komunikasi, hal ini berarti mendorong adanya dialog dan pertukaran informasi yang menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Komunikasi yang berlandaskan Pancasila menghindari diskriminasi, penyebaran kebencian, dan intoleransi, sehingga memperkuat persatuan dan persaudaraan di antara seluruh warga negara.
2. **Menghormati Kebebasan Beragama dan Berpendapat**
Pancasila memberikan jaminan atas kebebasan beragama dan berpendapat. Dalam konteks komunikasi, ini berarti memfasilitasi ruang diskusi yang terbuka, di mana

setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya tanpa takut akan represi atau pembatasan yang tidak adil (Ardi, M. A dan Suryana; 2020). Komunikasi yang demokratis dan inklusif, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, memberikan kesempatan bagi semua suara dan perspektif yang beragam untuk didengar dan dihormati.

3 Memperkuat Kesadaran Nasional

Ideologi Pancasila memperkuat kesadaran nasional, di mana setiap warga negara memiliki rasa kebanggaan terhadap identitas bangsa dan negara Indonesia. Dalam konteks komunikasi, ini berarti mengedepankan narasi yang memperkuat rasa kebersamaan, cinta tanah air, dan kepentingan bersama (Handayani; 2016) Komunikasi yang berbasis Pancasila mempromosikan pemahaman tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai Indonesia, serta menginspirasi rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa.

4 Mengembangkan Komunikasi yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial, membentuk landasan untuk mengembangkan komunikasi yang menghargai martabat manusia, menghindari diskriminasi, dan memperjuangkan keadilan. Komunikasi yang berlandaskan Pancasila melibatkan sikap empati, kerjasama, dan penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Hal ini menciptakan iklim komunikasi yang sehat, saling mendukung, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Dalam keseluruhan, ideologi Pancasila memberikan dasar yang kokoh bagi komunikasi yang

bermakna, inklusif, dan berdampak positif. Komunikasi yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam membangun persatuan, menghormati kebebasan, memperkuat identitas nasional, dan mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

A. Teori Komunikasi dalam Konteks Ideologi Pancasila

a. Komunikasi sebagai Proses Interaksi Simbolik

Komunikasi merupakan proses interaksi simbolik yang melibatkan pengiriman, penerimaan, dan pemahaman pesan antara individu atau kelompok (Abdullah, ;2017) Konsep komunikasi sebagai proses interaksi simbolik pertama kali diperkenalkan oleh George Herbert Mead, seorang sosiolog dan filsuf Amerika Serikat. Menurut Mead, komunikasi terjadi melalui penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna bersama dalam masyarakat.

Proses komunikasi melibatkan penggunaan simbol-simbol yang dipahami oleh individu atau kelompok yang terlibat. Simbol-simbol ini bisa berupa kata-kata, gerakan tubuh, isyarat, lambang, atau bahkan objek fisik. Melalui simbol-simbol ini, pesan dikodekan oleh pengirim dan didekodekan oleh penerima untuk mencapai pemahaman yang saling berarti (Adiyanto; 2019)

Komunikasi sebagai proses interaksi simbolik melibatkan beberapa elemen penting, antara lain:

1. Pengirim (Sender)

Pengirim merupakan individu atau kelompok yang menginisiasi proses komunikasi dengan mengirimkan pesan kepada penerima. Pengirim mengkodekan pesan menggunakan simbol-simbol yang dimengerti oleh

penerima.

2. Pesan (Message)

Pesan adalah informasi yang dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Pesan dapat berupa kata-kata, gambar, gerakan tubuh, atau simbol-simbol lainnya yang memiliki makna bersama.

3. Saluran Komunikasi (Channel)

Saluran komunikasi adalah medium yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima (Prasojo; 2019). Saluran ini dapat berupa lisan, tulisan, media elektronik, atau sarana komunikasi lainnya.

4. Penerima (Receiver)

Penerima adalah individu atau kelompok yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim. Penerima menerjemahkan atau mendekodekan pesan yang diterima untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya.

5. Umpan Balik (Feedback)

Umpan balik adalah respons atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim. Umpan balik ini penting untuk memastikan pemahaman yang saling berarti antara pengirim dan penerima, serta memungkinkan adanya penyesuaian atau klarifikasi pesan yang dikirimkan.

Dalam proses interaksi simbolik, komunikasi tidak hanya terbatas pada penyampaian pesan, tetapi juga melibatkan interpretasi, pemahaman, dan konstruksi makna bersama antara pengirim dan penerima. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan yang unik, sehingga interpretasi pesan dapat bervariasi.

Komunikasi sebagai proses interaksi simbolik juga mencerminkan pentingnya konteks dalam memahami pesan. Konteks dapat mencakup faktor sosial, budaya, sejarah, dan lingkungan yang mempengaruhi interpretasi dan makna pesan (Lestari dan

Indrayanti;2020). Oleh karena itu, dalam komunikasi yang efektif, pengirim perlu memperhatikan konteks dan berusaha mengirim pesan dengan jelas dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Dalam keseluruhan, konsep komunikasi sebagai proses interaksi simbolik menekankan pentingnya pemahaman bersama, interpretasi, dan konstruksi makna dalam proses komunikasi. Proses ini melibatkan penggunaan simbol-simbol yang dipahami oleh penerima, serta memperhatikan konteks yang mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pesan (Widianto; 2020).

b. Model-model Komunikasi

Terdapat beberapa model komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana komunikasi terjadi. Berikut ini adalah beberapa model komunikasi yang umum digunakan:

1. Model Linier (One-Way Model):

Model linier adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah, dimana pesan dikirim oleh pengirim kepada penerima melalui saluran komunikasi. Model ini menekankan pada peran aktif pengirim dalam menyampaikan pesan, sedangkan penerima berperan pasif dalam menerima pesan. Model linier mengabaikan umpan balik dan interaksi antara pengirim dan penerima.

2. Model Interaksional (Two-Way Model)

Model interaksional mengakui pentingnya umpan balik dan interaksi antara pengirim dan penerima dalam proses komunikasi. Model ini melibatkan aliran pesan dua arah, di mana komunikasi terjadi secara saling berpengaruh antara pengirim dan penerima. Pesan dapat diubah atau disesuaikan berdasarkan umpan balik yang diterima dari penerima.

3. Model Transaksional

Model transaksional menekankan

bahwa komunikasi adalah proses yang saling mempengaruhi antara pengirim dan penerima. Dalam model ini, komunikasi dipandang sebagai pertukaran pesan yang terjadi secara simultan antara kedua belah pihak (Yulianti dan Nurdiana; 2020) Komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata atau simbol, tetapi juga melalui tindakan, ekspresi, dan bahasa tubuh. Model ini mengakui bahwa pesan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh individu yang terlibat dalam komunikasi.

4. Model Berbasis Konteks

Model-model komunikasi berbasis konteks, seperti Model Komunikasi Kelompok, Model Komunikasi Organisasi, atau Model Komunikasi Antarbudaya, mengakui bahwa konteks sosial, budaya, dan situasional mempengaruhi proses komunikasi. Model-model ini menekankan pentingnya memahami konteks komunikasi dalam mencapai pemahaman yang efektif antara pengirim dan penerima.

5. Model Komunikasi Digital

Model-model komunikasi digital berkaitan dengan komunikasi yang terjadi melalui teknologi digital, seperti internet, media sosial, dan platform komunikasi elektronik lainnya. Model-model ini menyoroti karakteristik komunikasi online, seperti kecepatan, aksesibilitas, dan potensi perubahan pesan yang lebih mudah. Model-model komunikasi digital juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti identitas online, privasi, dan keamanan dalam komunikasi digital.

Perlu dicatat bahwa model-model komunikasi ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami dan menjelaskan komunikasi, namun realitas komunikasi yang kompleks sering kali melibatkan faktor-faktor yang lebih kompleks dan dinamis. Penggunaan model-model ini dapat

membantu kita memahami berbagai aspek dan elemen yang terlibat dalam proses komunikasi (Kurniawan dan Setiyadi; 2019)

1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi dalam Ideologi Pancasila

Dalam konteks ideologi Pancasila, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk pola komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Amaliyah dan Mulyana; 2018). Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam ideologi Pancasila:

a. Kehormatan dan Kesetaraan

Ideologi Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu dan mengakui kesetaraan semua warga negara. Faktor ini mempengaruhi komunikasi dengan mendorong sikap saling menghormati, adil, dan merangkul perbedaan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang berbasis Pancasila tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan, melainkan memperlakukan setiap individu dengan hormat dan kesetaraan.

b. Persatuan dan Persaudaraan

Pancasila mengadvokasi persatuan dan persaudaraan di antara seluruh warga negara Indonesia. Faktor ini mempengaruhi komunikasi dengan mempromosikan kolaborasi, kerjasama, dan penghargaan terhadap kepentingan bersama. Komunikasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila menciptakan iklim yang mendukung solidaritas dan kerukunan sosial.

c. Dialog dan Musyawarah

Pancasila mendorong dialog dan musyawarah sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Faktor ini mempengaruhi komunikasi dengan mengedepankan komunikasi

terbuka, saling mendengarkan, dan saling memahami. Komunikasi yang berlandaskan Pancasila menciptakan ruang untuk menyampaikan pendapat, menggali gagasan bersama, dan mencapai konsensus.

d. Keadilan Sosial

Ideologi Pancasila mengadvokasi keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor ini mempengaruhi komunikasi dengan memperhatikan keadilan, keseimbangan, dan pemerataan dalam penyebaran informasi, aksesibilitas, serta partisipasi dalam komunikasi. Komunikasi yang berlandaskan Pancasila memperjuangkan keadilan dan menghindari segala bentuk diskriminasi atau ketimpangan dalam berkomunikasi.

e. Tanggung Jawab Bersama

Ideologi Pancasila menekankan tanggung jawab bersama dalam membangun negara dan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Faktor ini mempengaruhi komunikasi dengan mendorong partisipasi aktif, pemikiran kritis, dan kontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Komunikasi yang berbasis Pancasila mengajak setiap individu untuk bertanggung jawab atas pesan yang disampaikan dan mendorong perubahan positif.

Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi komunikasi dalam konteks ideologi Pancasila (Haryani;2019). Melalui kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan penerapan faktor-faktor tersebut, komunikasi dapat menjadi sarana yang kuat untuk memperkuat persatuan, mencapai kesepakatan, dan membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

2 Pola Komunikasi dalam Ideologi Pancasila

a. Komunikasi Antarwarga Negara

Komunikasi antarwarga negara merujuk pada interaksi komunikatif yang terjadi antara individu-individu yang menjadi bagian dari satu negara. Ini melibatkan pertukaran pesan, gagasan, dan informasi antara warga negara yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan.

Komunikasi antarwarga negara memegang peran penting dalam membentuk ikatan sosial, memperkuat persatuan, dan mempromosikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat (Hutapea dan Agustina; 2020) Melalui komunikasi yang baik, warga negara dapat memahami satu sama lain, membangun rasa saling percaya, dan mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada

1. Komunikasi antara Pemerintah dan Rakyat

Komunikasi antara pemerintah dan rakyat merupakan aspek penting dalam menjaga hubungan yang baik antara pemegang kekuasaan dan warga negara. Komunikasi ini melibatkan pertukaran informasi, kebijakan, dan kepentingan antara pemerintah sebagai pengambil keputusan dan rakyat sebagai penerima kebijakan.

Komunikasi antara pemerintah dan rakyat dapat terjadi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pidato resmi, konferensi pers, siaran langsung, dan media massa (Hadi; 2018). Tujuan utama komunikasi ini adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah kepada rakyat, serta untuk mendengarkan aspirasi, masukan, dan kebutuhan rakyat.

Komunikasi yang efektif

antara pemerintah dan rakyat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan iklim yang kondusif bagi dialog, kolaborasi, dan kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam membangun negara yang lebih baik.

2. Komunikasi antara Rakyat dengan Sesama Rakyat:

Komunikasi antara rakyat dengan sesama rakyat melibatkan interaksi komunikatif antara individu-individu dalam masyarakat. Komunikasi ini meliputi pertukaran gagasan, pendapat, informasi, dan pengalaman antara warga negara yang memiliki kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai yang sama.

Komunikasi antara rakyat dengan sesama rakyat dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam keluarga, komunitas, lingkungan kerja, organisasi, atau forum diskusi public (Handayani; 2020). Tujuan komunikasi ini adalah untuk saling memahami, mendukung, dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

Komunikasi yang baik antara rakyat dengan sesama rakyat menciptakan iklim sosial yang harmonis, menghormati perbedaan, dan mendorong solidaritas. Melalui komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan menghargai, warga negara dapat membangun kepercayaan, mengatasi konflik, serta bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Komunikasi antara rakyat dengan sesama rakyat juga menjadi wadah untuk menyuarakan kepentingan, aspirasi, dan perubahan positif dalam masyarakat. Dengan berkomunikasi secara efektif, warga negara dapat

berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, memperkuat ikatan sosial, dan membangun kesadaran kolektif dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

b. Komunikasi Antarlembaga Negara
Komunikasi antarlembaga negara merujuk pada interaksi komunikatif yang terjadi antara berbagai lembaga negara yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam sistem pemerintahan. Komunikasi ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan kerjasama antara lembaga-lembaga negara untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun negara yang lebih baik.

Komunikasi antarlembaga negara menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam sistem pemerintahan. Melalui komunikasi yang baik, lembaga-lembaga negara dapat saling berbagi informasi, berkoordinasi dalam pengambilan keputusan, serta menghindari tumpang tindih atau konflik kepentingan.

Komunikasi antarlembaga negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pertemuan resmi, diskusi, surat-menyurat, atau mekanisme komunikasi elektronik. Beberapa lembaga negara yang terlibat dalam komunikasi antarlembaga meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga negara lainnya seperti badan otonom, komisi, atau lembaga advokasi.

Tujuan dari komunikasi antarlembaga negara adalah untuk memperkuat kerjasama, harmonisasi kebijakan, dan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Komunikasi yang efektif antarlembaga negara dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Rasyid dan Muhadjir;2016).

Selain itu, komunikasi antarlembaga negara juga berperan

dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan pengawasan antara lembaga-lembaga negara. Komunikasi yang terbuka dan transparan memungkinkan lembaga-lembaga negara untuk saling mengawasi, memberikan masukan, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan lembaga lainnya.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi antarlembaga negara penting untuk memastikan adanya keselarasan dengan prinsip dasar negara. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti musyawarah, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, harus menjadi pijakan dalam interaksi komunikatif antarlembaga negara untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan (Dedy Andhika dkk ; 2018) menjalankan tugas-tugas negara. Komunikasi yang efektif antara ketiga lembaga ini diperlukan untuk mencapai koordinasi, pemahaman bersama, dan sinergi dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan negara.

Komunikasi antara lembaga eksekutif (pemerintah) dengan legislatif (parlemen) memungkinkan adanya dialog dan konsultasi dalam penyusunan undang-undang, pembahasan anggaran negara, pengawasan pemerintah, serta evaluasi kebijakan. Pertukaran informasi yang terbuka dan saling mendengarkan antara kedua lembaga ini penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.

1. Komunikasi antara lembaga yudikatif (peradilan) dengan eksekutif dan legislatif berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta penegakan hukum yang adil. Lembaga yudikatif memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menjatuhkan keputusan

berdasarkan hukum, sementara eksekutif dan legislatif bertanggung jawab dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan mendukung kinerja lembaga yudikatif (Yasyva Agfa Nizar dan Yusnia l'anatur Rofiqoh). Komunikasi antara ketiga lembaga ini membantu memperkuat independensi lembaga yudikatif dan menjaga prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan.

2. Komunikasi antara Lembaga Negara dengan Masyarakat:

Komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat merupakan jembatan penting untuk memastikan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Lembaga negara, seperti pemerintah, parlemen, dan lembaga advokasi, perlu menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan masukan dari warga negara. Komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat dapat terjadi melalui berbagai saluran, seperti dialog publik, pertemuan komunitas, media massa, dan platform komunikasi digital. Lembaga negara harus berupaya untuk menjadi terbuka dan responsif terhadap masukan dan keluhan masyarakat, serta secara aktif menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan.

Komunikasi yang baik antara lembaga negara dengan masyarakat memungkinkan adanya partisipasi yang lebih luas, pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan publik, serta

membangun kepercayaan dan kerjasama antara warga negara dan lembaga negara. Dalam konteks ideologi Pancasila, komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, musyawarah, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan negara yang berkelanjutan (Shania Salma Thalib dan Jufri Alkatir)

c. Komunikasi Antaragama dan Antarbudaya dalam Ideologi Pancasila

Komunikasi antaragama dan antarbudaya memegang peran penting dalam konteks ideologi Pancasila di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengadvokasi kerukunan, keadilan, dan persatuan antara berbagai agama dan budaya yang ada di Indonesia. Komunikasi yang baik antara agama-agama dan budaya-budaya tersebut sangat penting untuk memperkuat harmoni, toleransi, dan kerjasama antara kelompok-kelompok tersebut.

Komunikasi antaragama bertujuan untuk mempromosikan saling pengertian, dialog, dan kerjasama antara pemeluk agama yang berbeda. Komunikasi ini berfokus pada pemahaman, penghormatan, dan pengakuan terhadap kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik keagamaan yang berbeda. Dalam konteks Pancasila, komunikasi antaragama berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, yang mendorong saling menghormati dan menerima

perbedaan sebagai kekayaan bangsa.

Komunikasi antarbudaya juga menjadi aspek penting dalam konteks ideologi Pancasila. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dengan berbagai suku, etnis, adat istiadat, bahasa, dan tradisi. Komunikasi antarbudaya bertujuan untuk membangun pemahaman, penghargaan, dan harmoni antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda. Melalui komunikasi antarbudaya, dapat terbentuk pengertian bersama, kerjasama, dan integrasi antara berbagai kelompok budaya, sehingga mendorong persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat.

Dalam ideologi Pancasila, komunikasi antaragama dan antarbudaya harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, persatuan, gotong royong, dan kemanusiaan. Komunikasi ini harus berfokus pada menghormati perbedaan, memperkuat kerjasama, dan membangun kesamaan dalam keragaman. Komunikasi yang efektif antaragama dan antarbudaya menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi individu dan kelompok untuk berpartisipasi, berinteraksi, dan membangun pemahaman bersama. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Oleh karena itu, komunikasi antaragama dan antarbudaya memiliki peran penting dalam menjaga harmoni, mengatasi konflik potensial, dan membangun kebersamaan dalam masyarakat.²⁷ Melalui komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan saling memahami, dapat terwujud kerukunan antaragama dan

antarbudaya yang merupakan salah satu pijakan kuat dalam mewujudkan cita-cita Pancasila untuk negara yang adil, demokratis, dan berkeadilan bagi semua warganya.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam konteks ideologi Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kerukunan, keadilan, dan persatuan di antara berbagai entitas dalam masyarakat. Ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengadvokasi nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan, yang menjadi landasan bagi komunikasi antara individu, lembaga negara, agama-agama, dan budaya-budaya yang berbeda. Komunikasi yang baik dalam ideologi Pancasila melibatkan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, komunikasi antara sesama rakyat, komunikasi antara lembaga negara dan masyarakat, komunikasi antarlembaga negara, serta komunikasi antara agama-agama dan antarbudaya. Komunikasi yang efektif dalam konteks ini berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, musyawarah, kesetaraan, persatuan, dan kemanusiaan.

Melalui komunikasi yang baik, warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, menyampaikan aspirasi, dan turut serta dalam pembangunan negara. Komunikasi yang terbuka, transparan, dan responsif antara lembaga negara dengan masyarakat membangun kepercayaan, memperkuat partisipasi publik, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik, melalui komunikasi yang efektif dalam ideologi Pancasila, diharapkan tercipta masyarakat

yang berdasarkan pada nilai-nilai persatuan, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan. Dengan komunikasi yang baik, kerjasama antarindividu, kelompok, dan lembaga negara dapat ditingkatkan, konflik dapat diatasi, dan persatuan dalam keragaman budaya dapat diperkuat.

Handayani. "Perubahan Hubungan Personal dan Komunikasi Tatap Muka akibat Interaksi Sosial di Era Digital," 2016, 203–14.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Sholeh,. Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abdullah. Komunikasi Antarbudaya: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenada media Group, 2017.
- Adiyanto. "Komunikasi Politik dalam Perspektif Pancasila: Studi Kasus pada Partai Politik di Indonesia." 6 2 (2019): 135–53. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.206>
- Amaliyah dan Mulyana. "Komunikasi Pemimpin dan Warganegara dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia." 13 2 (2018): 209–22.
- Andhika, Dedy, Bob Alfiandi, dan Aidinil Zetra. "Gaya Komunikasi Pimpinan Dalam Mengembangkan Inovasi Organisasi (Studi Kasus Kepemimpinan Kepala Dinas Kependudukan dan" 8, no. 2 (2018).
- Ardi, M. A dan Suryana, A. "Pola Komunikasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Prinsip Pancasila." 23 2 (2020): 123–34.
- Azis, M. I dan Alim, A. Komunikasi Politik dan Ideologi Pancasila. Surabaya: Pustaka Pelajar, 2019.
- Djajanegara dan Martowikrido, Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa. Bandung: Kencana, 2017. Hadi. Pancasila sebagai Etika Komunikasi Politik. Jakarta: Nuansa Cendekia, 2018.